



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SISWANTO
2. Jabatan : KEPALA BIRO KEUANGAN
3. NHK : 50837

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.503.000.000

1. Tanah Seluas 65 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 183.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HADIAH Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA LEGENDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001,
HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	841.182.379
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.726.301.352
Sub Total	Rp.	4.259.483.731
III. HUTANG	Rp.	1.228.245.185
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.031.238.546

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.